

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGANAN STUNTING
PADA BALITA (BAYI LIMA TAHUN)
DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



HADYA RAFIQI
177310848

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN REVISI PEMBIMBING

Nama : HADYA RAFIQI
Npm : 177310848
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Pada Balita (Bayi Lima Tahun) di Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferensif

Pekanbaru 22 Juli 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : HADYA RAFIQI
Npm : 177310848
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Pada Balita (Bayi Lima Tahun) di Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 22 Juli 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Anggota

Syaprianto, Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : HADYA RAFIQI
Npm : 177310848
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Pada Balita (Bayi Lima Tahun) di Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 22 Juli 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si

Septa Juliana, S.Sos,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Indra Safri,S.Sos.,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul **“Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Pada Balita (Bayi Lima Tahun) di Kabupaten Kampar”** dengan sebaik baiknya serta dengan ilmu penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga mendapat ridho dari Allah. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr . H. Syafrinaldi, MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama saat proses bimbingan berlangsung.
5. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai akhir ini, dan untuk kakak dan adik-adik serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dan teman-teman terdekat yang telah ada saat senang dan susah dan saling mensupport serta membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Penulis

HADYA RAFIQI
177310848

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Pemerintahan	18
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	22
3. Konsep Peranan	24
4. Stunting	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir	29
D. Konsep Operasional	30
E. Operasional Variabel.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Jenis dan Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35

G. Teknik Analisa Data	30
H. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	36
I. Rencana Sistematika Hasil Penelitian.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Kampar	38
1. Sejarah Kabupaten Kampar.....	38
2. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar.....	39
3. Sosial ekonomi, Lingkungan dan pendidikan Kabupaten Kampar.....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Identitas Informan	59
1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	59
2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia	60
3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan satunting pada balita di Kabupaten Kampar.....	62
1. Rule (Peraturan-peraturan)	63
2. Individual	72
BAB VI PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase penderita Stunting pada 16 Desa di Kabupaten Kampar	10
Tabel I.2: Jumlah anggaran perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kampar	11
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel II.2 Konsep Peranan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting yang akan di analisis dalam penelitian	31
Tabel III.1 Informan.....	34
Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasrkan Jenis Kelamin..	60
Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia	61
Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	62
Tabel V.4 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang	66
Tabel V.5 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang	69
Tabel V.6 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang.....	72
Tabel V.7 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang	75
Tabel V.8 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang.....	78
Tabel V.9 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang.....	80
Tabel V.10 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang.....	83
Tabel V.11 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang.....	85
Tabel V.12 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang.....	88
Tabel V.13 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir 29



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADYA RAFIQI
Npm : 177310848
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Pada Balita (Bayi Lima Tahun) di Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juli 2022
Pelaku Pernyataan,

HADYA RAFIQI
177310848

ABSTRAK

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGANAN STUNTING PADA BALITA (BAYI LIMA TAHUN) DI KABUPATEN KAMPAR

HADYA RAFIQI

177310848

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Kesehatan dalam penanganan Stunting di Kabupaten Kampar dan untuk mengahui hambatan hambatan dalam penanganan Stunting pada balita, Indikator pada Peranyang di gunakan meliputi membuat aturan atau norma, pemberian edukasi (ividual), Struktural. Tipe penelitian beralokasi di Kabupaten Kampar ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian dan di sesuaikan dengan situasi di lapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dan key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan pegawai Dinas Kesehatan beserta masyarakat yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, data yang terkumpul kemudian di jadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Berdasarkan pada teknik analisi di atas peneliti melihai dan menyimpulkan bahwa Peran Dinas Kesehatan di Kabupaten Kampar sudah optimal dalam penanganan stunting, masih adanya balita menderita stunting di wilayah Kabupaten Kampar, hal ini terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan dalam penanganan stunting

Kata Kunci : Peran, Penanganan Stunting, Kabupaten Kampar

ABSTRACT

THE ROLE OF THE HEALTH OFFICE IN HANDLIN STUNTING IN TODDLERS (FIVE YEARS INFANTS) IN KAMPAR REGENCY

HADYA RAFIQI

177310848

This study aims to find out how the role of the Health Service in dealing with stunting in Kampar Regency and to find out the obstacles in handling stunting in toddlers. Indicators in the role used include making rules or norms, providing education (individual), structural. This type of allocated research in Kampar Regency uses qualitative methods, namely a study that uses humans as research instruments and is adjusted to the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data in the form of words. written or spoken from people and observable behavior. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. The informants and key informants in this study were the Head of the Public Health Division of the Kampar District Health Office and the employees of the Health Service and the community concerned. The data collection techniques used consisted of Observation, Interview, and Documentation, the data collected was then used as the main raw material to analyze the empirical conditions and the objectivity of the existence of research objectives at the location being studied. Based on the analysis technique above, the researchers looked at and concluded that the role of the Health Service in Kampar Regency was optimal in handling stunting, there were still toddlers suffering from stunting in the Kampar Regency area, this happened because there were still obstacles in handling stunting.

Keywords: Role, Handling Stunting, Kampar Regency

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV diantaranya berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin di capai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu : Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social, Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut di bagi atas Kabupaten dan Kota. Untuk menindak lanjuti amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Maka Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 3 bagian, pertama Urusan Pemerinthan Absolut, kedua Urusan Pemerintahan Konkuren dan yang ketiga adalah Urusan Pemerintahan asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan umum Asas Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat kedaerah, domain dari

desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Asas tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan Pemerintahan Absolute adalah urusan pemerintah yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat meliputi: Politik luar negri, Pertahanan,Keamanan, Yusitisi, Moneter dan fiskalnasional, Agama,

Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Dalam pasal 12 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi: Pendidikan,

Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat Ketentraman, Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi: Tenaga kerja, Pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudksn dan pencatatan sipil, Pemerdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman, Penanaman modal usaha, Kependudukan dan olah raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,

Selanjutnya pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang meliputi : Kelautan dan perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Pariwisata, Industry, Perdagangan, Ketransmigrasian

Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai Kepala Pemerintahan meliputi: Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembinaan persatuan dan kesatuan Indonesia, Pembinaan kerukunan antar suku dan

intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional., Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pada di pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal.

Dari kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota salah satunya urusan kesehatan. Dan didalam Wewenang Dan Kewajiban Presiden juga merupakan salah satu yang mempunyai Hak untuk mengatur masalah Kesehatan, Di dalam undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan: “bahwa kesehatan merupakan hak Asasi manusia dan salah satu bagian kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan UU Negara RI tahun 1945, Dalam peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang “pengawasan dibidang Kesehatan” Dan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang

Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit. Dimana Stunting termasuk dalam pembahasan di setiap bab nya.

Pendapatan yang cukup memungkinkan untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan yang baik membantu pemilihan makanan dengan bijak dan tepat, serta penanganan gangguan kesehatan dengan baik, stunting dipengaruhi oleh faktor komunitas dan masyarakat, yaitu politik dan ekonomi; pelayanan kesehatan; pendidikan, masyarakat dan budaya; sistem pertanian dan pangan; serta air, sanitasi, dan lingkungan. Terdapat tiga faktor pada level penyebab stunting, yaitu rumah tangga dan keluarga (faktor ibu dan lingkungan rumah); pemberian makanan pendamping yang tidak memadai (kualitas makanan, praktik pemberian makan, kualitas pangan dan air minum); pemberian air susu ibu; dan penyakit infeksi

Indonesia mempunyai masalah Gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus Gizi buruk pada anak balita. Balita pendek (stunting) adalah masalah kurang Gizi kronis sehingga berdampak gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan Gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya anak tumbuh lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Salah satu permasalahan yang di hadapi di dunia khusus nya di negara berkembang dan miskin yaitu Penyakit Stunting. Stunting adalah penyakit permasalahan gizi yang di alami oleh balita (bayi lima tahun) yang akan menyebabkan gagal nya pertumbuhan dan meningkatnya resiko kematian dan kesakitan terhadap balita, stunting bukan hanya menghambat pertumbuhan fisiknya saja tetapi juga mengganggu atau menghambat perkembangan otak yang

mengakibatkan kualitas SDM tidak baik, sehingga mempengaruhi generasi generasi berikutnya.

Secara fisik maupun psikomotorik Anak balita yang terjangkit penyakit stunting cenderung akan sulit mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, Faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya stunting yaitu faktor pendidikan ibu, Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kesehatan, salah satunya adalah status gizi. Individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar mengetahui pola hidup sehat dan cara menjaga tubuh tetap bugar yang tercermin dari penerapan pola hidup sehat seperti konsumsi diet bergizi. Individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung menghindari kebiasaan buruk seperti rokok dan alkohol, sehingga memiliki status kesehatan yang lebih baik. Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan pendapatan, dimana tingkat pendapatan cenderung meningkat seiring peningkatan tingkat pendidikan.

Pendapatan yang cukup memungkinkan untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan yang baik membantu pemilihan makanan dengan bijak dan tepat, serta penanganan gangguan kesehatan dengan baik, stunting dipengaruhi oleh faktor komunitas dan masyarakat, yaitu politik dan ekonomi; pelayanan kesehatan; pendidikan, masyarakat dan budaya; sistem pertanian dan pangan; serta air, sanitasi, dan lingkungan. Terdapat tiga faktor pada level penyebab stunting, yaitu rumah tangga dan keluarga (faktor ibu dan lingkungan rumah); pemberian makanan pendamping yang tidak memadai (kualitas makanan, praktik

pemberian makan, kualitas pangan dan air minum); pemberian air susu ibu; dan penyakit infeksi

Kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya, Kesehatan termasuk bagian urusan pemerintahan konkuren, Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dijabarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan penanggulangan stunting yang disebut sebagai stranas stunting. Stranas bergerak dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Intervensi yang dilakukan mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik memfokuskan pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penetapan lokus stunting di kabupaten/kota prioritas yang telah dilakukan secara bertahap sejak 2018, termasuk di Provinsi Riau.

Kabupaten kampar merupakan daerah yang banyak mengalami stunting pada balita, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang pencegahan stunting dan pemberian cakupan imunisasi rendah sehingga sistem kekebalan tubuh bayi lemah, penetapan wilayah prioritas di dasarkan pada data masalah gizi kronis (stunting),

Dasar penetapan Kampar sebagai lokus stunting Berdasarkan Hasil Keputusan tentang kegiatan padat karya dan penanganan stunting di 10 Kabupaten dan 100 desa lokus stunting yang dilaksanakan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Menteri Kesehatan dan Lembaga terkait, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai lokus stunting tahun 2019 dengan pertimbangan :

- a) Geografis
- b) Kemiskinan
- c) Angka gizi buruk

Menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa persentase balita stunting Provinsi Riau saat ini 27,35% yang tersebar di 12

kabupaten/kota (Kementerian Kesehatan RI, 2019a). Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki desa lokus stunting pada tahun 2019, dengan prevalensi 32,05% balita stunting. Prevalensi ini berada di atas prevalensi provinsi dan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2019c). Selain itu, hasil survei nasional ini juga menunjukkan bahwa dari 47,6% bayi yang memiliki catatan panjang lahir di Kabupaten Kampar, sebanyak 26,8 % lahir dengan panjang badan pendek (<48 cm). Selain itu, dari 81% ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah di Kabupaten Kampar, hanya 37,7 % ibu hamil yang mengonsumsi minimal 90 tablet. Secara umum persentase bayi menyusu eksklusif di Provinsi Riau juga masih rendah yaitu 22,9%, angka ini berada di bawah persentase nasional (37,3%) (Kementerian Kesehatan RI, 2019c, 2019a). Program pemerintah telah dijalankan dalam menangani stunting pada balita, baik dari aspek kesehatan (intervensi spesifik) maupun aspek non kesehatan (intervensi sensitif). Berbagai program sudah dimulai bahkan sebelum penetapan lokus stunting di Kabupaten Kampar.

Pada 2020, penetapan desa lokus stunting sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Kampar (Perbup) nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Penetapan ini sudah berdasarkan analisis situasi jumlah balita stunting di Kabupaten Kampar. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa terjadi peningkatan balita stunting dalam setahun terakhir, jumlah penderita stunting yang meningkat dapat dilihat pada table berikut dari 2019 ke 2020 di 3 desa yaitu:

di Desa Ranah Singkuang, Desa Bangun Sari ,serta Desa Tanjung Karang. Sedangkan tujuh desa lainnya sudah menunjukkan penurunan persentase balita

stunting, yaitu di bawah 20% sesuai rekomendasi WHO. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kampar nomor 440.439/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kampar Tahun 2020, ditetapkan 13 desa menjadi lokus baru, ditambah 3 desa di tahun 2019 yang persentase stuntingnya di atas 20%. Sehingga total desa yang menjadi lokus stunting yaitu 16 desa untuk tahun 2020, jumlah dan persentase penderita Stunting dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel I.1. Persentase penderita Stunting pada 16 Desa di Kabupaten Kampar

No	Desa	Jumlah pendek dan sangat pendek	Persentase	Keterangan
1.	Tanjung Karang	17	33,3	Desa tahun 2019, Kec. Kampar Kiri Hulu
2.	Ranah Singkuang	34	23,3	Desa tahun 2019, Kec. Kampar
3.	Bangun Sari	16	20,8	Desa tahun 2019, Kec. Kampar Kiri Hilir
4.	Balung Sungai	44	26,5	Kec. XIII Koto Kampar
5.	Sungai Geringging	25	25,0	Kec. Kampar Kiri
6.	Sungai Raja	20	20,4	Kec. Kampar Kiri
7.	Padang Sawah	29	23,1	Kec. Kampar Kiri
8.	Sungai Liti	51	23,9	Kec. Kampar Kiri
9.	Batu Sanggan	8	20,5	Kec. Kampar Kiri Hulu
10.	Indra Sakti	55	23,2	Kec. Tapung
11.	Kampung Pinang	35	20,1	Kec. Perhentian Raja
12.	Teluk Kenidai	46	24,8	Kec. Tambang
13.	Bukit Betung	14	23,7	Kec. Kampar Kiri Hulu
14.	Sialang Kubang	43	20,5	Kec. Perhentian Raja
15.	Sungai Putih	22	20,1	Kec. Kampar Timur
16.	Tabing	38	21,3	Kec. Koto Kampar Hulu

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (2020)

Penetapan lokus intervensi tahun 2020 ini berdasarkan persentase balita stunting di atas 20%. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase balita stunting tertinggi ada di Desa Tanjung Karang. Desa ini secara geografis lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten, dan jumlah terbanyak penderita stunting ada di Desa Indara Sakti, kecamatan Tapung. melihat banyak nya jumlah balita penderita stunting, khusus nya di Kecamatan maka Dinas Kesehatan harus mampu menekan angka stunting dengan cara salah satunya yaitu memberikan cakupan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Kampar.

Anggaran program untuk perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kampar Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel I.2 Jumlah anggaran perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kampar

No	Program Perbaikan Gizi	Jumlah Anggaran
1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	22.000.000
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	19.500.000
3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro	40.000.000
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	20.250.000
5	Pencegahan dan penanggulangan stunting	143.685.000
6	Penurunan stunting (DAK penugasan)	1.239.999.000
7	Bantuan operasional Kesehatan Stunting (DAK NON FISIK)	750.000.000
		2.235.434.000

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau

Anggaran program penanganan stunting tahun 2019 ini berdasarkan Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang di keluarkan dalam penangana stunting sebesar Rp. 2.235.434.000, mulai dari Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, Pemberian tambahan makanan dan vitamin, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, Pencegahan dan penanggulangan stunting, Penurunan stunting (DAK penugasan), Bantuan operasional Kesehatan Stunting (DAK NON FISIK).

Program dan kegiatan penanganan stunting tahun 2019 yang telah dilaksanakan antara lain: pengadaan antropometri kit, perbaikan gizi keluarga, dan bantuan operasional kesehatan (Dinas Kesehatan); pengembangan pertanian pada lahan kering (Dinas Pertanian); kawasan rumah tangga pangan lestari, pemberian bibit buah dan sayur, pembuatan rumah bibit, penyediaan perlengkapan dan pupuk (Dinas Ketahanan Pangan); pengembangan usaha pengolahan hasil ikan (Dinas Kelautan Perikanan); bina keluarga balita (BKB), pertemuan edukasi 1000 HPK, pengadaan BKB kit (Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak); penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar untuk masyarakat miskin, bedah rumah untuk sanitasi layak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang); bimbingan teknis pendidikan keluarga terkait stunting (Dinas Pendidikan dan Olah Raga).

Hasil FGD menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar telah memiliki inovasi program spesifik lokal untuk penanganan stunting yang dikenal dengan nama "Gadi Ancak", "Ocu Mapan", "Posyandu Mobile", dan GEMARIKAN. Program ini melibatkan multisektor dalam pelaksanaannya sehingga ada proses koordinasi yang berjalan.

Program Ocu Mapan merupakan inisiasi dari Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan singkatan dari Optimalisasi Cara Untuk Mandiri Pangan.

Program ini bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi pangan keluarga secara mandiri, sederhana, dan mudah. Pencegahan balita stunting diharapkan dapat terwujud melalui konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman dari lahan pekarangan rumah tangga

Posyandu *mobile* merupakan program pemantauan pertumbuhan balita melalui penimbangan dari rumah ke rumah untuk balita yang tidak datang ke posyandu. Kunjungan rumah dilakukan oleh kader posyandu. Kemudian dilaksanakan juga posyandu di tempat yang ramai seperti pasar, yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas.

Program GEMARIKAN merupakan singkatan dari Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan Kegiatan ini memanfaatkan potensi sumber daya alam Kabupaten Kampar berupa ikan khas dari Sungai Kampar dan perikanan darat (kolam), seperti ikan baung dan ikan patin. Mekanisme pelaksanaan program ini yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai gizi yang terkandung dalam ikan; kegiatan lomba mewarnai ikan untuk balita PAUD; lomba memasak untuk siswi SMA sederajat yang bertujuan untuk mempersiapkan calon ibu agar paham dalam mengolah aneka macam masakan berbahan dasar ikan; dan sosialisasi manfaat konsumsi ikan melalui lomba memasak ikan antar PKK.

Program-program spesifik lokal untuk pencegahan stunting ini sudah ada namun belum optimal. Keterlibatan tokoh adat, keterlibatan ninik mamak sebagai tokoh adat yang dijunjung tinggi masyarakat belum sepenuhnya dioptimalkan dalam intervensi pencegahan stunting, sehingga hal ini perlu diperhatikan agar program memberi dampak yang kuat dalam penurunan stunting di Kabupaten Kampar.

Dalam penurunan angka stunting pemerintahan berupaya menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) yang bertujuan untuk mempercepat penurunan Stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Terdapat 5 (lima) pilar dalam strategi nasional tersebut, yaitu: 1) komitmen dan visi kepemimpinan; 2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; 4) Gizi dan ketahanan pangan; dan 5) Pemantauan dan evaluasi. Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah seperti swasta, masyarakat, dan komunitas.

Dalam menekan angka stunting di kabupaten Kampar Dinas Kesehatan melakukan dan menerapkan Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi yakni (1) analisis situasi, (rencana kegiatan), (3) Rembuk Stunting, (4) Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, (5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, (6) Sistem Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan (8) Reviu Kinerja Tahunan. Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi konvergensi dilakukan melalui intervensi gizi spesifik (kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan) dan sensitif (upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan) dengan sasaran Rumah Tangga 1000 Hari

Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses layanan 20 indikator penurunan stunting secara lengkap (konvergen) di lokus stunting dengan menelaraskan berbagai sumberdaya yang dimiliki.

Berbagai usaha dalam mengatasi masalah Gizi telah dilakukan melalui program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemberian kapsul vitamin adalah pemberian tablet Fe untuk daerah rawan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Sebagai indikator terhadap status gizi bayi dipergunakan Angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan terhadap Balita dengan menggunakan indikator balita Kurang Energi Protein (KEP) dengan skala likert (gizi buruk, kurang, baik dan lebih). Status gizi pada bayi BBLR dan balita di bawah garis merah (BGM) dapat dilihat pada uraian dibawah ini

Dari pemaparan di atas berdasarkan analisa dan sumber data yang penulis temukan maka penulis akan membahas tentang peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada balita(bayi lima tahun) di kabupaten Kampar. Dari informasi di atas maka penulis menemukan fenomena sebagai berikut:

1. Terindikasi Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan pada balita di Kabupaten Kampar
2. Terindikasi Masih banyaknya penderita stunting pada balita di Kabupaten Kampar
3. Terindikasi Masih kurangnya pengetahuan masyarakat teruma perempuan tentang faktor penyebab terjadinya stunting

Berkaitan dengan fenomena diatas,penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGANAN STUNTING PADA BALITA (BAYI LIMA TAHUN) DI KABUPATEN KAMPAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: **Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Pada Balita(Bayi Lima Tahun) Di Kabupaten Kampar ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran dinas kesehatan dalam menangani permasalahan gizi pada balita atau stunting di Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stunting

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara akademis, Hasil penelitian ini di harapkan Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama di masa mendatang.
2. Manfaat secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pembanding antara teori yang di dapatkan di bangku perkuliahandengan fakta yang ada di lapangan.

3. Manfaat secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti secara teoritis maupun dengan melihat fakta dilapangan.
- b. Bagi pemerintah, sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar mengenai Perani Dinas Kesehatan dalam menekan laju penderita stunting di kabupaten Kampar untuk penentu kebijakan di masa mendatang.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, merupakan sumber referensi bagi jurusan ilmu Pemerintahan yang akan melakukan penelitian lebih mengenai masalah penderita stunting di Kabupaten Kampar

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam mempermudah melakukan penelitian **mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Pada Balita (Balita Bayi Lima Tahun) Di Kabupaten Kampar**, maka penulis akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang menurut penulis erat kaitanya dengan pemecahan masalah yang di hadapi penulis dalam penelitian ini, adapun di dalam menggunakan konsep teoritis dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Konsep Pemerintahan

Konsep pemerintahan dalam penerapan di dalam kehidupan kita dalam bernegara membutuhkan wadah atau suatu lembaga maupun organisasi dari negara tersebut. Yaitu memang lembaga atau organisasi yang mendapat kepercayaan mengimplentasikan dari negara adalah pemerintah. Dimana didalam bernegara untuk mencapai tujuan bersama harus berupaya dalam mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena banyak pemimpin-pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik. Syafiie (2005:11)

Menurut Munaf (2016:47) Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Ndaha (2011:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undang untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (Sehingga diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut musanef (dalam Syaffie 2011:7) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin sertamenyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan

dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingnya diwakili oleh dinas.

Dari penjelasan Ndraha tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang didalam bernegara harus ada organisasi besar yang mengatur dan mengurus serta Dari penjelasan Ndraha tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang didalam bernegara harus ada organisasi besar yang mengatur dan mengurus serta memberikan pelayanan kepada warga nya karena ini bagian dari tujuan di dalam kita bernegara. Maka Pemerintah merupakan suatu fenomena awal yang perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan anantara yang memerintah dan yang diperintah. Guna dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji, mengembangkan dan mempelajari agar dapat diterapkan didalam kegiatan pemerintahan memang diungkapkan terlihat mudah padahal ternyata didalam penerapan dan prakteknya adalah suatu pemahaman yang memang itu rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar untuk keberlangsungan pemerintahan negara pada saat ini.

Dalam Ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga public dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:3) antara lain sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan dengan keserasian ke dalam dan antara hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingan diwakili dinas tersebut.

- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koorninasi, pengawasan kedalam atau keluar.
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintahan dan yang perinta. Dapat diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pertentangan.
- d. Pihak yang lain dan mengusahakan agar dpat keerasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

Ilmu yang ditetapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara

Sarundajang (2002:5) mengatakan bahwa kehadiran dan keberadaan pemerintahan adalah menjadi suatu keharusan bagi proses kewajiban masyarakat.sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat baik dalam bentuk kelompok maupun individu sangat membutuhkan pelayanan pemerintah.

Berdasarkan Epistimologi kata pemerintahan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan menurut Sumaryadi (dalam Rauf 2017:224) bahwa secara umum pemerintah dapat didefenisikan organisasi yang ototrtas memerintah dari suatu unit politik. Kekuasaan yang memerintah suatu masyrakat politik (Politik Will), aparaturnya merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-

undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal Dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang bearti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakam antara pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga eksekutif (Kansil 1984;21)

Pemerintahan Daerah adalah kepala beserta perangkat daerah otonom lain nya sebagai badan eksetutif daerah, Merupakan penyelenggaraan pemerintah Otonomi daerah. Oleh karena itu wilayah kesatuan republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten dan kota, maka pemerintah daerah terdiri atas Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing beserta perangkatnya (Halim, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya telah disebut di atas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan

dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Seiring dengan prinsip diatas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal ini tak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang memang dapat dari segala aspek kehidupan masyarakat dengan harapan tujuan dapat tercapai.

3. Konsep Peranan

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St.Harahap, dkk, 2007: 854). Menurut Soerjono

Soekanto (2004:212) peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Selanjutnya menurut Veitzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Kemudian menurut Miftah Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan

dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketigakomponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya

Menurut Soerjono Soekanto (2004:213) peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

4. Stunting

Anak pendek (stunting) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang (Unicef, 2013). Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002; Unicef, 2013).

Stunting prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa (Unicef, 2013; Unicef Indonesia, 2013). Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan (Hoffman et al, 2000; Bloem et al, 2013). Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi (Unicef, 1990; Hoffman, 2000; Umeta, 2003).

Factor yang terkait dengan tingginya stunting pada bayi yang diberi ASI. Hasilnya menunjukkan bahwa bayi dari ibu yang mempunyai konsentrasi seng yang rendah dalam ASI lebih banyak yang stunting (Assefa et al, 2013). Faktor determinan lainnya yang berhubungan dengan kejadian stunting adalah faktor sosial ekonomi. Status`sosial ekonomi, usia, jenis kelamin dan pendidikan ibu merupakan faktor penting dari status gizi remaja (underweight dan stunting) (Assefa, 2013). Untuk intervensi pengurangan stunting jangka panjang, harus dilengkapi dengan perbaikan dalam faktor-faktor penentu gizi, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, beban penyakit, dan kurangnya pemberdayaan

perempuan (Bhutta, 2008). Kebijakan gizi nasional dan organisasi internasional harus memastikan bahwa kesenjangan yang terjadi ditangani dengan mengutamakan gizi di daerah pedesaan dan kelompok-kelompok termiskin dalam masyarakat. Kebijakan yang mendukung distribusi yang lebih adil dari pendapatan nasional, seperti kebijakan perlindungan sosial, memainkan peranan penting dalam meningkatkan gizi (Cobham, 2013).

B. Penelitian Terdahulu

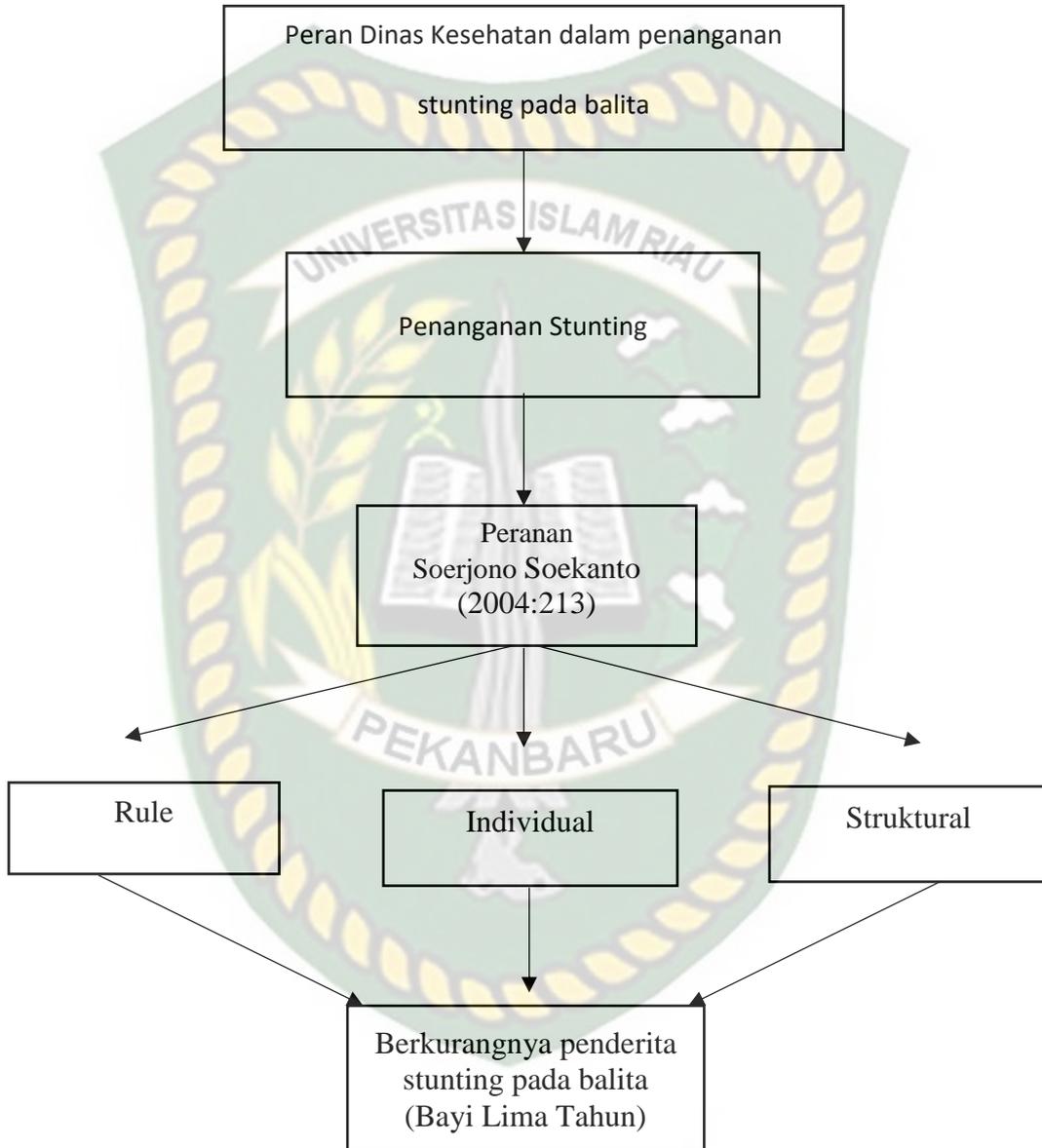
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang di angkat penulis, yaitu:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Normaisa/2020	Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang	Adapun tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam menekan laju penderita stunting di kabupaten enrekang, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi
	Arini Ulfa Mawaddah/2017	Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue	Adapun tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Kesehatan Dalam pengendalian DBD, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi
	Intan Sri Wulandari/2018	Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Kasus Gizi Buruk Pada Balita Di Kecamatan Brebes	Adapun tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk dan kendala-kendala yang di hadapi pada balita di kecamatan brebes dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, dan wawancara

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir



Sumber: *Modifikasi penulis 2020*

D. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok dari sekian banyak kelompok yang disiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan umum masyarakat. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.
2. Pemerintahan Daerah Adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, Peran merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
4. Stunting merupakan permasalahan gizi yang di alami oleh balita (bayi lima tahun) yang dapat mengganggu kesehatan yang akan cenderung menyebabkan sulitnya pencapaian potensi pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik

maupun metalnya,yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat di karenakan menurunnya kualitas sumber daya manusia yang di sebabkan stunting tersebut.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Konsep Peranan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting yang akan di analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indaktor
1	Peranan mencakup tiga hal yaitu peraturan peraturan,individual dan struktural (Soerjono Soekanto)	Peran Dinas Kesehatan dalam Penanganan stunting di kabupaten kampar	1.Rule	Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
			2.Individual	Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
			3.Struktural	Peranan dalam arti ini juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam permasalahan ini agar dapat memperoleh jawaban dari masalah tersebut maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu mengamati keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Mengklarifikasi metode kualitatif untuk menguji hipotesis teori (Sugiyono, 2016:38) berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskriptif data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari infroman dan perilaku-perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar,Dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar ini memiliki peran dalam penanganan Stunting terhadap balita,Ditetapkannya Dinas Kesehatan ini sebagai lokasi penelitian, karena saat ini banyaknya penderita stunting di Kabupaten Kampar,. Padahal masalah stunting sudah di atur dalam Permenkes 29 tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit.

C. Informan Penelitian

1. Key Informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian menurut Bagong Suyanto (2006:173). Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

2. Informan

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005: 720). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar,

Key Informan dan Informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Informan:

No	Nama	Pendidikan	Jabatan/Status	Ket
1	Afrida Yanti, sst, M.Kes	S2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Key Informan
2	Filzah	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Informan
3	Nur kholina	SLTA	Ibu rumah Tangga	Informan

Sumber: Olahan Penulis 2021

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sugiyono (2016 : 308) Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan data sekunder adalah sebagai berikut: "Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi kualitatif adalah ketika penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu individu di lokasi penelitian, pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan umum kepada partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka (Creswell,2016)

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pedoman wawancara ini sendiri adalah anantara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan lainnya yang saling berhubungan kepada informan

3. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan dari hasil laporan, buku-buku, dan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan selanjutnya diambil dari sumber yang ada, Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang dihasilkan melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat

G. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih yang mana pentingnya dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.

H. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2022																				
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP		X	x	x	x																
2	Seminar UP							x														
3	Revisi UP								x	x												
4																						
5	Survay/Penelitian Lapangan											x	x	x								
6	Survay Lapangan											X										
7	Analisis data/pengolahan data													x								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian/bimbingan (Skripsi)															x	x					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	x				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																				x	
11	Revisi Skripsi																				X	
12	Penggandaan Skripsi																					

Sumber : Modifikasi 2021

I. Rencana Sistematika Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, operasionalisasi variabel, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan sejarah ringkas tempat penelitian, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, sumber daya organisasi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas tentang identitas responden, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terbentuk sejak Tahun 1956 berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 dengan Ibukota Kabupaten di Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau nomor KPTS.318/VII/1987, tanggal 17 Juli 1987.

Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan pembantu Bupati wilayah II di Pangkalan kerinci. Pembantu Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai. Sedangkan pembantu Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Kecamatan lainnya yang tidak termasuk ke dalam dua wilayah I dan II tersebut dikoordinir langsung oleh Kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 75 tahun 1999, tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 kabupaten

yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang Bupati dengan satu orang Wakil Bupati.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada saat ini, terdapat 118 desa berkembang (47,20%), 73 desa merupakan desa tertinggal (29,20%), 30 desa merupakan desa sangat tertinggal (12,00%), 20 desa merupakan desa maju (8,00%), dan 1 desa merupakan desa mandiri (0,40%). Adapun jumlah desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 23 desa (9,20%).

2. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°27'00" Lintang Selatan, 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Luas wilayah Kabupaten Kampar \pm 1.228.390 Ha atau \pm 11,94% dari luas wilayah Provinsi Riau (8.915.016 Ha). Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Kampar terbagi atas 21 Kecamatan, 250 Desa dan Kelurahan. Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Bagkinang Kota yaitu 177.180 km² (14,42%) diikuti Kecamatan Tapung seluas 136.597 km² (11,1%), sedangkan Kecamatan Kampar Utara dengan luas 7.984 km² (0,64%) dan Kecamatan Rumbio Jaya seluas 7.692 km² (0,62%) merupakan Kecamatan yang terkecil luasnya di Kabupaten Kampar.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- a. Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Bagian sungai ini melewati beberapa Kecamatan yaitu: Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- b. Sungai Siak bagian Hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 meter yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi dengan baik, yaitu sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Sebagian besar Kabupaten Kampar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 0 – 500 meter dari permukaan laut. Struktur tanah atau jenis tanah adalah arganosol, glei humus, aluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah

kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus. Tanah arganosol ini semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dikenal dengan type gambut ombrogen.

Jarak lurus ibu kota Kecamatan yang terdekat dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Ibu Kota Kecamatan Bangkinang (Desa Muara Uwai) yaitu \pm 3 km (kecuali Kecamatan Bangkinang). Sedangkan jarak yang terjauh adalah Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Hulu (Desa Gema) yaitu \pm 140 km, Dilihat dari ketinggian beberapa daerah atau kota di Kabupaten Kampar dari permukaan laut berkisar antara 26-100 meter. Daerah atau Kota yang tertinggi adalah Desa Gema yakni 100 meter dan yang terendah adalah Desa Tambang yakni 26 meter.

3. Sosial ekonomi, Lingkungan dan pendidikan Kabupaten Kampar

a. Pekerjaan

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang selanjutnya akan membutuhkan lapangan kerja. Berdasarkan hasil Susenas 2011 jumlah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun keatas) yang masuk angkatan kerja sebesar 90,05 % dan bukan angkatan kerja 9,95 %. Dari 90,05 % angkatan kerja tersebut yang bekerja hanya 50,68 %, sedangkan yang mencari pekerjaan adalah 39,37 %.

Dilihat dari lapangan usaha penduduk yang bekerja di Kabupaten Kampar sebagian besar bekerja pada sektor Pertanian yakni sebesar 67,22 %, Perkebunan dan Kehutanan. Kemudian yang menyerap pasar kerja berikutnya adalah jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 11,35 % dan pada sektor

Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 7,77 %. Sedangkan persentase terkecil bekerja pada sektor listrik, gas dan air hanya 0,22 %.

Berdasarkan hasil Susenas 2017 jumlah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun keatas) yang masuk angkatan kerja sebesar 80,93 % dan bukan angkatan kerja 19,06 %. Dari 80,93% angkatan kerja tersebut yang bekerja hanya 76,01%, sedangkan yang mencari pekerjaan adalah 4,91%. Dilihat dari lapangan usaha penduduk yang bekerja di Kabupaten Kampar sebagian besar bekerja pada sektor Pertanian yakni sebesar 93,0 %, Perkebunan dan Kehutanan. Kemudian yang menyerap pasar kerja berikutnya adalah jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 6,99 % .Sedangkan persentase terkecil bekerja pada sektor listrik, gas dan air hanya 6,72 %. Melihat proporsi angkatan kerja yang mayoritas petani, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan dibidang kesehatan masih sangat rendah, walaupun rata-rata tingkat ekonomi berada pada posisi yang relatif tinggi, karenanya dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang diharapkan dapat mendukung program kesehatan diperlukan suatu upaya yang spesifik terhadap mereka, sehingga program kesehatan dapat benar- benar menyentuh sasaran yang di harapkan.

b. Tingkat Sosial

Masalah kependudukan tidak hanya terletak pada tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk, namun telah bergeser kepada masalah kualitas seperti halnya kemiskinan dan gender. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh berbagai dinas, instansi berwenang di bawah koordinasi Pemerintah Daerah, baik melalui bantuan langsung maupun tidak langsung dengan sumber dana pinjaman luar negeri dan biaya kompensasi pengurangan

subsidi bahan bakar minyak yang semuanya ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS - BBM) bidang kesehatan adalah program kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin (Gakin). Perkembangan jumlah keluarga miskin menurut indikator kesehatan dari Tahun ke Tahun selama Program diluncurkan memperlihatkan bahwa pada Tahun 2015 jumlah masyarakat miskin 136.466 jiwa yang memperoleh pelayanan kesehatan disarana kesehatan 22.871 jiwa. Pada Tahun 2015 jumlah masyarakat miskin 269.879 jiwa yang memperoleh pelayanan kesehatan disarana kesehatan strata 1 adalah 99.214 jiwa. Pada Tahun 2016 jumlah masyarakat miskin 279.611 jiwa yang memperoleh pelayanan kesehatan disarana kesehatan strata 1 adalah 129.149 jiwa. Pada Tahun 2017 jumlah masyarakat miskin 295.387 jiwa yang memperoleh pelayanan kesehatan disarana kesehatan strata 1 adalah 117.118 jiwa. Pada Tahun 2018 jumlah masyarakat miskin 315.110 jiwa yang memperoleh pelayanan kesehatan disarana kesehatan strata 1 adalah 12.484 jiwa. Pada Tahun 2019 jumlah masyarakat miskin 290.285 jiwa (36% dari jumlah penduduk) yang memperoleh pelayanan kesehatan disarana kesehatan strata 1 adalah 742 jiwa. Pada Tahun 2020 jumlah masyarakat miskin 262,351 jiwa (59.89% dari jumlah penduduk) yang memperoleh pelayanan kesehatan disarana kesehatan strata 1 adalah 414 jiwa. Masyarakat miskin yang ada semuanya mencakup JAMKESMAS dan JAMKESDA dan jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya.

c. Pendidikan

Keberhasilan Pembangunan di suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di wilayah tersebut, apalagi di era Globalisasi saat ini. Rendahnya kualitas SDM sudah barang tentu akan menghambat Pembangunan yang dijalankan oleh suatu Wilayah yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat itu sendiri dengan lambat tercapainya tujuan Pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu Bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas Pendidikan.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM yang digunakan adalah Angka Melek Huruf atau kemampuan baca tulis penduduk usia >10 Tahun. Pada tahun 2016 penduduk usia >10 tahun yang melek huruf sebanyak 278.219 atau 49,71%. Hal ini menunjukkan masih ada sekitar 50,29% penduduk di Kabupaten Kampar > 10 tahun masih buta huruf. Disamping Angka melek huruf, indikator lain adalah Angka partisipasi sekolah yang menunjukkan tingkat partisipasi yang bersekolah dijenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Adapun angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kampar pada tahun 2015 tamat SD 26,69%, tamat SMP 20,98%, tamat SMA 17,75%, tamat diploma III 1,10%, tamat universitas atau diploma IV 2,76% dan tamat master atau doktor sebanyak 0,14%. Pada tahun 2017 penduduk usia >10 tahun yang melek huruf sebanyak 427.652 atau 75,33%. Hal ini menunjukkan masih ada sekitar 24,67% penduduk di Kabupaten Kampar > 10 tahun masih buta huruf. Disamping Angka melek huruf, indikator lain adalah Angka partisipasi sekolah yang menunjukkan tingkat

partisipasi yang bersekolah dijenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Adapun angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 tamat SD 26,29%, tamat SMP 20,65%, tamat SMA 23,29%, tamat diploma III 1,08%, tamat universitas atau diploma IV 2,72% dan tamat master atau doktor sebanyak 0,13%.

Pada tahun 2018 penduduk usia >15 tahun yang melek huruf sebanyak 549.064 atau 69,64%. Hal ini menunjukkan masih ada sekitar 30,36% penduduk di Kabupaten Kampar > 15 tahun masih buta huruf. Disamping Angka melek huruf, indikator lain adalah Angka partisipasi sekolah yang menunjukkan tingkat partisipasi yang bersekolah dijenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Adapun angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kampar pada tahun 2018 tamat SD 29,30%, tamat SMP 23,17%, tamat SMA 26,65%, tamat diploma III 1,38%, tamat universitas atau diploma IV 3,87% dan tamat master atau doktor sebanyak 0,19%.

Pada tahun 2019 penduduk usia >15 tahun sebanyak 214.078 atau 26,6%. Adapun angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kampar pada tahun 2019 tamat SD 75,17%, tamat SMP 59,44%, tamat SMA 68,38%, tamat diploma III 3,54%, tamat universitas atau diploma IV 9,93% dan tamat master atau doktor sebanyak 0,49%.

Pada tahun 2020 penduduk usia >15 tahun sebanyak 557.577 atau 68,7%. Adapun angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 tamat SD 28,3 %, tamat SMP 22,7 %, tamat SMA 27,4 %, tamat diploma II 1,0%, tamat diploma III 1,5%, tamat universitas atau diploma IV 4,4% dan tamat master atau doktor sebanyak 0,2%.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan sarana yang memadai. PAUD berjumlah 801 , Sekolah dasar berjumlah 510 sekolah, SLTP berjumlah 140 sekolah dan SLTA berjumlah 78 sekolah. Perguruan tinggi di Kabupaten Kampar ada 3, yang menamatkan sarjana muda dan sarjana lengkap.

d. Keadaan lingkungan

Di Kabupaten Kampar penyakit-penyakit berbasis lingkungan masih merupakan insiden tertinggi penyebab terjadinya suatu penyakit. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, disajikan persentase rumah sehat, tempat-tempat umum sehat dan rumah atau bangunan bebas jentik. Selain itu disajikan pula beberapa indikator tambahan yang dianggap masih relevan, yaitu persentase rumah tangga menurut sumber air minum.

Iklm dan Lingkungan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan, meliputi pencemaran udara, air, tanah dan makanan akan semakin meningkat. Pencemaran udara di kota-kota besar di Indonesia termasuk Pekanbaru dan Bangkinang meningkat 2 kali lipat dari Tahun 2020 dengan sumber emisi kendaraan bermotor, kegiatan industri dan pembakaran lahan. Pencemaran udara di dalam ruangan makin perlu diwaspadai karena masih tingginya kebiasaan merokok di masyarakat.

Penanganan limbah rumah tangga Perkotaan, baik limbah padat maupun limbah cair yang belum memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat merupakan ancaman bagi penduduk yang bermukim di Perkotaan dan sekitarnya. Pencemaran lingkungan yang mengancam kesehatan dapat pula terjadi akibat bencana, baik bencana oleh kegiatan maupun akibat ulah manusia.

Terbatasnya ketersediaan air bersih merupakan ancaman bagi kesehatan penduduk. Terbatasnya kemampuan masyarakat, utamanya di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan juga merupakan tantangan yang berat bagi terciptanya lingkungan yang sehat. Jenis lahan gambut yang dominan di Kabupaten Kampar berakibat air tanah yang dimanfaatkan masyarakat kurang higienis, berwarna coklat teh, kemungkinan berdampak kurang baik terhadap kesehatan gigi masyarakat.

4. Gambaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2017–2022 dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 –2019 adalah pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar harus selaras dengan pembangunan kesehatan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2015 –2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 -2025.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah program unggulan integrasi Kabupaten Kampar menjadi acuan dalam menyusun program prioritas pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kampar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dijabarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar yang secara umum bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Secara rinci tujuan Dinas Kesehatan yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Kesehatan”, dengan Indikator Indeks Keluarga Sehat. Dengan mengacu kepada Dokumen Perencanaan yang dimiliki Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahun 2020 dan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Program Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bersama jajaran kesehatan tidak akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya tanpa keterlibatan dari sektor lain yang terkait, peran lintas sektor dan swasta serta masyarakat umumnya. Bila

dikoordinasikan dengan baik secara sinergis maka apa yang menjadi visi kabupaten Kampar dapat tercapai.

1. Visi dan Strategi Pembangunan Kesehatan

Visi dan Strategi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2020 yang dijabarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kampar dalam bidang kesehatan pada dasarnya mendukung Visi dan Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kampar

VISI Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kampar yang juga merupakan Visi Kabupaten Kampar, yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera ”

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan Visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang kesehatan. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi jajaran Kesehatan mewujudkan sasaran Pembangunan di Kabupaten Kampar khususnya Pembangunan sektor kesehatan

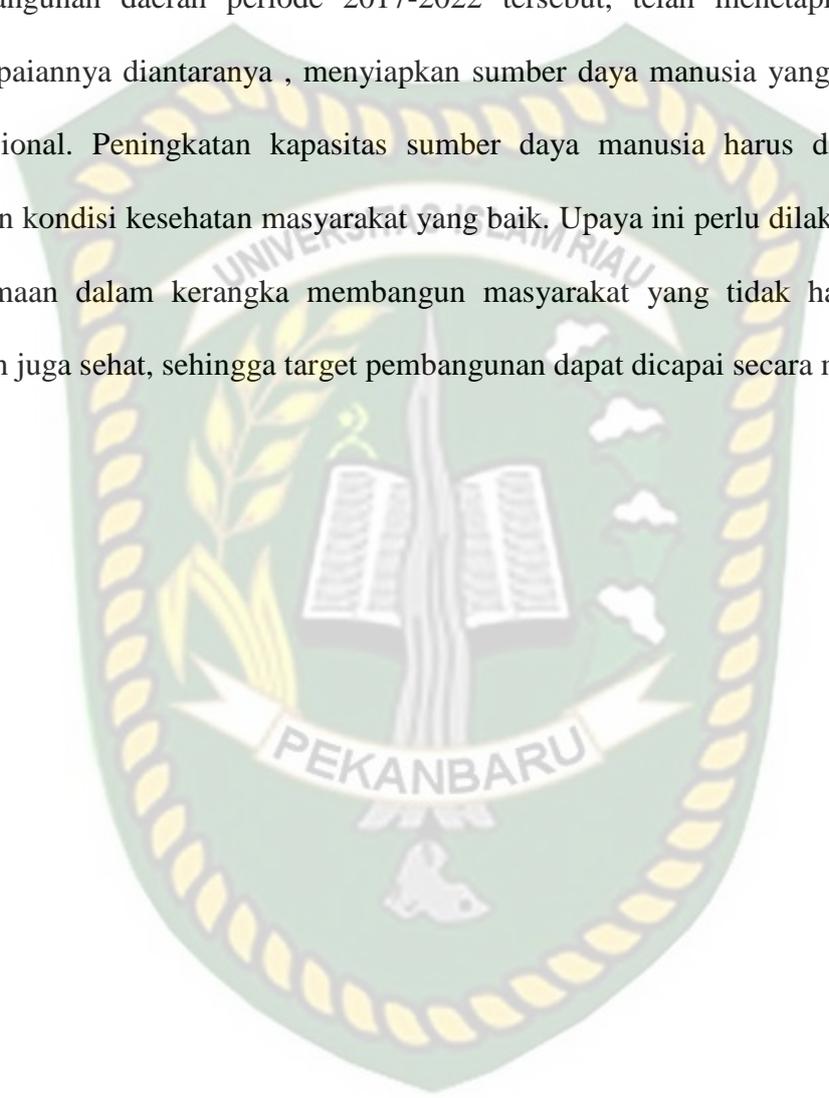
2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visinya telah menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan.
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

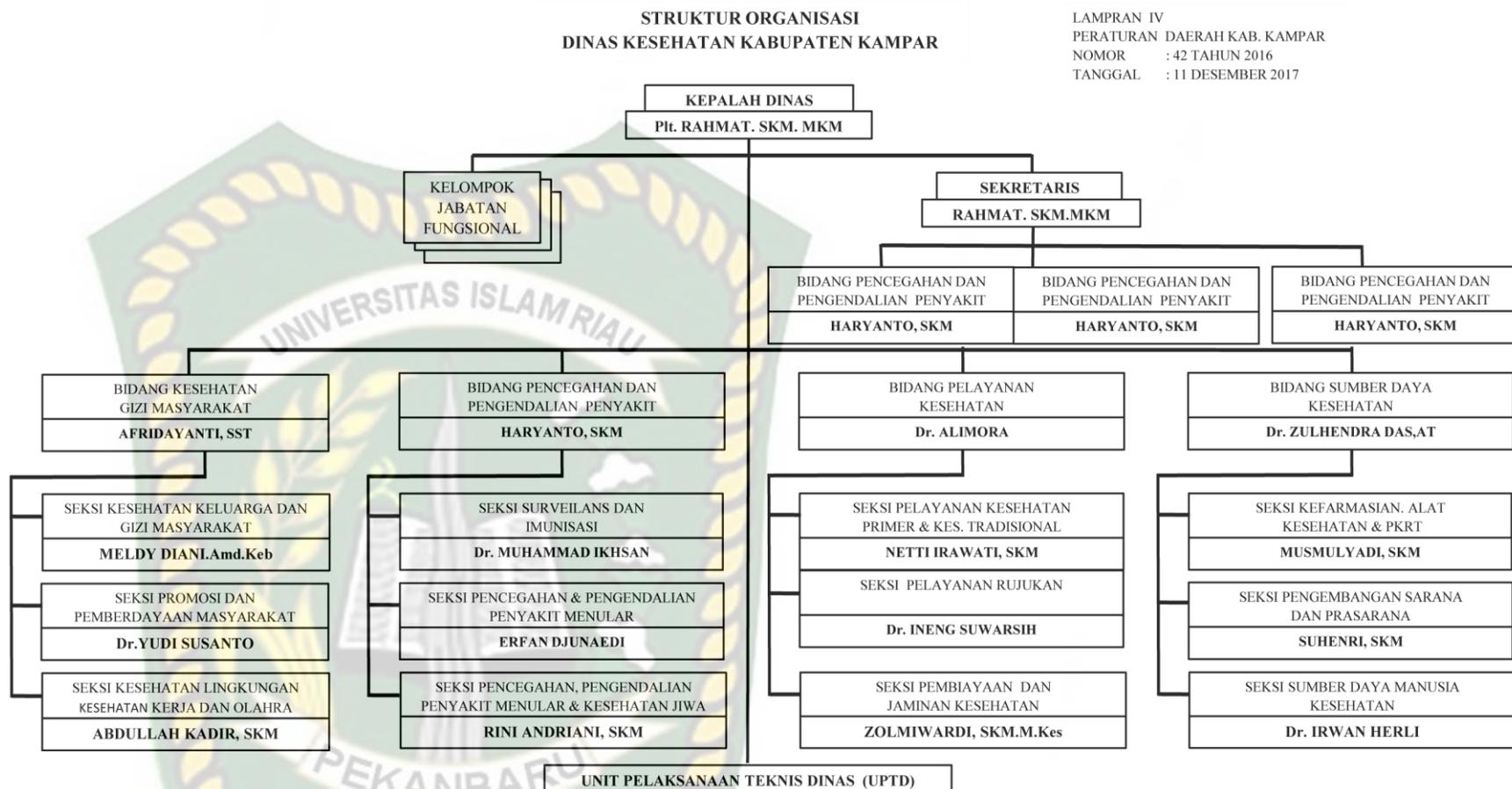
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visinya pembangunan daerah periode 2017-2022 tersebut, telah menetapkan strategi pencapaiannya diantaranya , menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dijamin pula dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Upaya ini perlu dilakukan secara bersamaan dalam kerangka membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas namun juga sehat, sehingga target pembangunan dapat dicapai secara maksimal.



5. Struktur Organisasi Kabupaten Kampar

Struktur organisasi Kabupaten Kampar dapat dilihat di bawah ini:



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini sebelum masuk kepada substansi hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menjelaskan identitas informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian ini sangat penting di jelaskan Identitas Informan penelitian agar pembacanya merasa bahwa penelitian ini adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian ini yang jelas sudahlah pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Identitas informan itu diperlukan sebagai salah satu upaya didalam memberikan jawaban gambaran bagaimana tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan dengan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, bagian kesehatan masyarakat dan Masyarakat yang mebersangkutan di Kabupaten Kampar. Adapun identitas informan yang penulis jelaskan didalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin infoman, usia informan, dan pendidikan informan.

1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan keterangan lengkap dari informan penelitian dan untuk dapat penjelesan berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarakan Jenis Kelamin

no	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (100%)
1	Laki-laki	-	-
2	Perempuan	3	100%
Jumlah		3	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa key Informan dan Informan yang terdiri dari Kepegawaian, bagian kesehatan masyarakat di bidang gizi, dan Masyarakat yang bersangkutan berdasarkan jenis kelamin, Laki-laki berjumlah 2 orang perempuan berjumlah 3 orang dengan presentasi 100%.

2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia adalah suatu kematangan pikiran seseorang didalam mengambil keputusan apasaja yang harus dilakukan maupun yang tidak harus dilakukan. Usia juga merupakan suatu faktor menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kenyataan untuk mengumpulkan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Usia infoman yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan di ajukan guna memperoleh data yang di butuhkan oleh peneliti. Berikut ini adalah tabel yang digambarkan kriteria informan, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	25-30	-	0%
2	30-45	2	80%
3	45-60	1	20%
Jumlah		3	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepegawaian, bagian kesehatan masyarakat bidang gizi, dan Masyarakat yang bersangkutan dengan kreteria umur 25-30 tahun itu berjumlah 0 orang dengan presentase 0% kreteria umur 30-45 tahun itu jumlahnya 3 orang dengan presentase 80% kreteria umur 45-60 tahun itu jumlahnya 1 orang dengan presentase 20%.

3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Apabila tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka pola berpikirnya akan lebih matang dalam berbuat dan bertingkah laku didalam menjawab pertanyaan yang akan di ajukan. Pemahaman seorang informan juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dilalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkat pendidikan Informan yaitu sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(100%)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	40%
4	Strata 2 (S2)	1	60%
Jumlah		4	100%

Sumber:Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari bidang kesehatan masyarakat bagian gizi, Kepegawaian, dan Masyarakat yang bersangkutan berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 orang dengan Presentase 30%, Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas berjumlah 1 orang dengan presentase 30%, dan Strata 1 (S2) berjumlah 2 orang dengan presentase 60%.

B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan satunting pada balita di Kabupaten Kampar

Kemampuan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting pada balita dapat dilihat dari peran yang di lakukan oleh dinas kesehatan, dalam pasal 3 peraturan Bupati Kampar nomor 32 tahun 2020 tentang Peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi, di sebutkan tujuan di keluarkan Peraturan Bupati tersebut untuk menetapkan kewenangan desa dalam integrasi intervensi penurunan stunting, meningkatkan alokasi penggunaan APBDes oleh pemerintahan desa guna mendukung penurunan stunting, memfasilitasi intervensi

penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan layanan penurunan stunting dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi desa dalam penurunan stunting, selanjutnya dalam mengukur sejauh mana peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar, peneliti menggunakan 3 indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), yaitu peraturan-peraturan (Rule), Individual, dan Struktural

1. Rule (Peraturan-peraturan)

Rule (peraturan-peraturan) dalam penanganan stunting dapat di lihat dari proses terbentuknya kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Kampar, melalui proses kebijakan penentuan solusi terhadap masalah yang diyakini menjadi prioritas di Kabupaten Kampar didiskusikan dan pada akhirnya akan ditetapkan sebuah kebijakan untuk penyelesaiannya. Kemudian, setelah kebijakan tersebut terbentuk, maka akan lahirnya berbagai macam peran yang dianggap mampu untuk memperbaiki masalah yang terjadi, seperti halnya dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kampar. dalam mengukur sejauh mana peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar, peneliti menggunakan 3 indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), yaitu peraturan-peraturan (Rule), Individual, dan Struktural

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, pembentukan Peraturan Bupati Kampar nomor 32 tahun 2020 tentang Peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi, didasarkan pada terpilihnya Kabupaten Kampar sebagai lokus stunting nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Pusat. Alasan lainnya juga adalah tingginya angka stunting pada anak balita di Kabupaten Kampar.

Sehingga harapan terbesar Kementerian Pusat, menggunakan dana alokasi khusus dapat difokuskan dalam menyelesaikan permasalahan stunting di Kabupaten Kampar. Kemudian setelah ditetapkannya Kabupaten Kampar sebagai lokus stunting nasional, maka diperlukan sasaran lokasi yang menjadi lokus penanggulangan stunting di Kabupaten Kampar untuk setiap desanya.

a. Kebijakan dan peraturan dalam penanganan stunting

Setiap peran yang di lakukan harus dapat dilakukan sepenuhnya, agar tujuan yang di harapkan dapat dicapai, implementasi kebijakan dalam penanganan stunting pada anak balita sangat di perlukan dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kampar. Maka pihak dinas kesehatan melakukan kebijakan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dalam mengukur sejauh mana peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar, peneliti menggunakan 3 indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Menurut ibuk Afrida Yanti selaku kepala bidang kesehatan masyarakat menyampaikan sebagai berikut :

“kita (Dinas Kesehatan) tidak mengeluarkan kebijakan atau aturan yang baru,Dinas kesehatan hanya megikuti apa yang telah di atur oleh kementrian,kita hanya menjalankan nya saja,tidak perlu kita mengeluarkan aturan atau kebijakan dalam penanganan stunting karena kebijakan dan aturan sudah ada di kementrian jadi kita hanya menjalankan dan menerapkan nya ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afirida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menganalisis bahwa dinas kesehatan tidak lagi mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang baru dalam

penanganan stunting, dinas kesehatan hanya mengikuti dan menjalankannya saja serta menerapkan peraturan yang sudah ada yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan dalam penanganan stunting di kabupaten Kampar

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibu Filzah selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui bahwa ada adanya peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di Kabupaten Kampar, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“kalau dilihat dari orang dinas kesehatan sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang telah ada, kalau soal peraturan atau kebijakannya saya sebagai masyarakat tidak tau apakah dinas kesehatan membuat kebijakan atau pun peraturan dalam penanganan stunting karena tidak pernah ada pemerintahan daerah turun langsung bersosialisasi dengan masyarakat kalau ada peraturan mengenai stunting, seharusnya pemerintah setidaknya baleho atau spanduk yang terpasang di jalan tentang aturan stunting, seperti contoh orang yang melakukan pembakaran hutan ada sanksi dan peraturan yang jelas terpasang di baleho”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Filzah selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang peneliti menganalisis bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan tugasnya dan menerapkan dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan untuk penanganan stunting di kabupaten Kampar tetapi untuk mengetahui apakah dinas kesehatan mengeluarkan kebijakan atau peraturan masyarakat tidak tahu, masyarakat hanya tahu bahwa dinas-dinas menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada yang telah ditetapkan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibu Nur Kholina selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari Rabu

tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui bahwa ada adanya peraturan atau kebijakan yang di buat oleh dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di Kabupaten Kampar, lalu Ibu Nur kholina mengatakan:

“saya rasa dek dari pihak dinas kesehatan sudah menjalankan dan melaksanakan tugas nya sesuai peraturan yang telah ditetapkan dari atas untuk penanganan stunting pada bayi yang menderita stunting di Kabupaten Kampar ini, saya rasa kalau peraturan atau pun kebijakan tentu pasti adanya untuk penanganan stuning di setiap desa-desa baik itu dari pusat maupun dari dinas itu sendiri, karena adanya peraturan tersebut maka dinas kesehatan saya lihat bersungguh sungguh menjalankan peran”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang peneliti menganalisis bahwa Dinas kesehatan sudah melakukan tugas nya dan menerapkan dan menjalankannya, dinas kesehatan jelas ada peraturan atau pun kebijakan yang di jalankan sebagai pedoman dalam penanganan stunting di setiap desa-desa

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang dapat lihat berikut ini:

Tabel V.4 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtita s balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan secara langsung di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang ada dari dinas kesehatan melaksanakan peraturan atau pun kebijakan yang telah ditetapkan oleh kementerian untuk penanganan stunting seperti adanya 5 pilar dan 8 aksi konvergensi dan masyarakat merasakan adanya keinginan dari orang dinas kesehatan dalam menekan angka stunting di kabupaten kampar.

b. Sikap Pelaksana

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sikap implementor dapat berupa respon, tanggapan, tindakan, dan motivasi, dalam mengukur sejauh mana peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar, peneliti menggunakan 3 indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Terkait sikap pelaksana ibu Afrida Yanti selaku kepala bidang kesehatan masyarakat menyampaikan sebagai berikut :

“Sikap kami sebagai pelaksana semaksimal mungkin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang di berikan dalam penanganan stunting di setiap desa-desa Kabupaten Kampar, seperti kami sebagai pelaksana bersikap profesional dalam menjalankan tugas, kami turun ke langsung ke desa-desa memeriksa bayi dan lain sebagainya”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Afrida Yanti selaku kepala bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar peneliti menganalisis bahwa Dinas Kesehatan dalam sikap pelaksana nya dinas kesehatan untuk semaksimal mungkin melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas yang di berikan dalam penanganan stunting di kabupaten Kampar.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibuk Filzah selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui sikap pelaksana dari dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“Menurut saya dek untuk sikap pelaksana para pelaksana kebijakan cukup bagus, Cuma masih banyak yang kurang teliti dan peduli, factor nya mungkin kurang nya pemahaman pelaksana tentang kebijakan atau pun aturan yang telah di buat, dari dinas kesehatan memang bagus, tanggap dan responsif untuk penanganan stunting setiap desa, mereka sering turun seperti pegawai nya ke lapangan untuk memeriksa bayi di desa, dan mereka juga bertanggung jawab atas tugas yang di berikan ”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu filzah selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, peneliti menganalisis bahwa sikap pelaksana dari dinas kesehatan dapat di katakan bagus dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak balita di desa- desa kabupaten Kampar.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu masyarakat Ibuk Nur Kholina selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai sikap pelaksana dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di Kabupaten Kampar, lalu Ibu Nur kholina mengatakan:

“kalau menurut saya sikap pelaksana dari pihak dinas kesehatan keliatan mereka udah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas nya yang di berikan untuk penanganan stunting, dan mereka juga bertanggung jawab atas tugas yang di berikan ”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, peneliti menganalisis bahwa sikap pelaksana dari dinas kesehatan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas yang di berikan dalam penanganan stunting di setiap desa Kabupaten Kampar, dan dinas kesehatan juga bertanggung jawab atas tugas yang di berikan dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak balita di kabupaten Kampar.

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.5 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtitas balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa sikap pelaksana dari dinas kesehatan memang cukup bagus dalam menjalankan peraturan yang ada dan tugas yang di berikan dalam penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar.

c. Komitmen Pelaksana

Untuk mengetahui komitmen pelaksana dalam penanganan stunting di kabupaten kampar, untuk mengukur sejauh mana peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar, peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Terkait Komitmen pelaksana, ibu Afrida Yanti selaku kepala bidang kesehatan masyarakat menyampaikan sebagai berikut :

“Sikap komitmen pelaksana dalam penanganan stunting saya rasa cukup bagus dan apalagi komitmen kepala dinas itu juga nanti ada aplikasi untuk menentukan bagaimna entri ,nanti tiap mereka mengirim laporan jadi kami memantau langsung kalau mereka sudah entri atau belum,contoh nya nanti kalau ada puskesmas yang hasil entri nya di bawah rata rata maka kami akan memanggil kepala puskesmas langsung dari kepala dinas bersama bidan untuk mengintrogasi,jadi seperti itu kami setiap bulan supaya nanti tidak ada laporan da semuanya yang tercecer”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afirida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menganailisi bahwa dalam komitmen tenaga kerja dinas kesehatan sudah cukup bagus untuk menjalankan tugas masing-masing, dan karena adanya motivasi langsung dari komitmen kepala dinas dalam menjalankan tugas sehingga membuat tenaga kerja kesehatan lebih termotivasi dalam berkomitmen dalam menjalankan setiap tugas-tugas nya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibuk Filzah selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui komitmen pelaksana dari dinas kesehatan dalam

menjalankan tugasnya untuk penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“Setau saya Untuk komitmen dari pihak dinas kesehatan dalam menjalankan tugasnya sudah cukup bagus saya rasa dalam penanganan stunting pada anak bayi di kabupaten Kampar, saya lupa waktunya tapi mereka terus datang ke desa-desa untuk memeriksa anak-anak kami dan memberikan pengetahuan bahaya nya stunting pada anak-anak”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu filzah selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, peneliti menganalisis bahwa Komitmen pelaksana dari dinas kesehatan cukup bagus dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu orang tua bayi yang penderita stunting dengan ibu Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di tempat, beliau mengatakan bahwa:

“Bisa dikatakan komitmen pegawai dalam menjalankan suatu aturan ataupun kebijakan yang di buat tergolong kuat atau bagus, mungkin yang di katakana adek dengan adanya dorongan motivasi dari atasan mereka membuat para pegawai serius dalam melaksanakan tugasnya, jadi intinya Komitmen pelaksana dari dinas kesehatan saya merasa cukup bagus dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak-anak kami”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang bahwa Komitmen pelaksana dari dinas kesehatan dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak yang menderita stunting di kabupaten kampar sudah bagus.

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten

Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.6 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtit as balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan secara langsung di lapangan bahwa komitmen pelaksana dari dinas kesehatan memang cukup bagus dalam menjalankan peraturan yang ada dan tugas yang di berikan dalam penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar, dan ada nya motivasi dari komitmen kepala dinas kesehatan dalam penanganan stunting ,sehingga para tenaga kerja dinas kesehatan lebih komitmen dalam menjalan aturan dan kebijakan yang telah di berikan untuk penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar.

2. Individual

Individual dapat dimaksudkan dengan Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi (Soerjono Soekanto 2004:213), Dalam hal ini dengan mengadakan Individual yaitu untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan yang akan di gunakan dalam penanganan

stunting Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

a. Sosialisasi dan Edukasi

Dalam menyukseskan penanggulangan stunting pada anak balita di Kabupaten Kampar pihak dinas kesehatan melakukan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan hambatan pencegahan stunting dan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang stunting, peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Terkait Sosialisasi dan edukasi ibu Afrida Yanti selaku kepala bidang kesehatan masyarakat menyampaikan sebagai berikut :

“dalam pemberian edukasi kami turun ke seluruh desa dalam melakukan sosialisasi stunting bukan hanya dinas kesehatan aja tetapi juga dengan yang lain seperti pertanian perikanan dan lain lain ikut berkontribusi dan ketika kami turun ke lapangan ibu ibu yang ada di desa datang dan berkumpul karena mengetahui kedatangan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afirida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam sosialisasi dan edukasi dinas kesehatan cukup bagus karena langsung turun ke lapangan dimana dinas kesehatan berkontribusi dengan dinas dinas yang lain, dengan adanya sosialisasi dan edukasi tersebut para ibu rumah tangga ikut senang dan menyambut kedatangan dari dinas kesehatan dan dinas lainnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibuk Filzah selaku orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal

29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui tentang sosialisasi dan edukasi yang di lakukan dinas kesehatan dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“Untuk pemberian edukasi dan sosialisasi dinas kesehatan langsung turun ke desa-desa, dan kami para ibu-ibu ketika mereka datang kami senang dan langsung berkumpul untuk sosialisasi dan edukasi tentang stunting dari dinas kesehatan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu filzah selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang bahwa untuk pemberian edukasi dan sosialisasi dinas kesehatan sudah bagus, orang dinas kesehatan langsung turun ke desa-desa untuk memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu atau perempuan, dan masyarakat ikut senang dan sikap pelaksana dari dinas kesehatan cukup bagus dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu orang tua bayi yang penderita stunting dengan ibu Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang tentang mengetahui apakah ada sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dinas kesehatan pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di tempat, beliau mengatakan bahwa:

“ya sosialisasi dan pemberian edukasi menurut saya sudah dilaksanakan dengan baik secara umumnya saja, pegawai pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat di desa, untuk pemberian edukasi dan sosialisasi dinas kesehatan memang langsung turun ke desa-desa, dan ketika dinas kesehatan datang ke desa- desa bersama dinas lainnya kami ikut senang dan berkumpul dalam sosialisasi dan pemberian edukasi dari dinas kesehatan bersama dinas yang lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang bahwa untuk pemberian edukasi dan sosialisasi dinas kesehatan bersama dinas-dinas lainnya sudah bagus, orang dinas kesehatan langsung turun ke desa-desa untuk memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat khusus nya ibu-ibu atau perempuan, dan masyarakat ikut senang dan sikap pelaksana dari dinas kesehatan cukup bagus dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar.

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.7 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idenditas balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa dalam pemberian edukasi dan sosialisasi yang di lakukan oleh dinas kesehatan memang cukup bagus, dan dinas kesehatan bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain untuk melaksanakan sosialisasi dan pemberian edukasi dalam penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar.

c. Pelaksanaan di Lapangan

Dalam menekan angka stunting, dinas kesehatan melakukan pelaksanaan di lapangan untuk mengetahui penderita stunting dan penanganan stunting pada anak balita di Kabupaten Kampar, untuk mengetahui apa saja pelaksanaan di lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan, peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan ibu Afrida Yanti selaku bagian kepala bidang kesehatan masyarakat, menyampaikan:

“Dalam pelaksanaan adanya pemberian edukasi,adanya PMT (pemberian makanan tambahan) PMT ini juga di support oleh kementerian kesehatan berupa biskuit, di dalam keping biskuit tersebut semua zat zat yang di perlukan bagi ibu hamil dan bayi,dan peran kami dinas kesehatan yaitu bagaimana biskuit tersebut sampai kepada yang bersangkutan memang sampai ke mulut anak yang terkait stunting”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afirida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan sudah bagus, seperti pemberian edukasi,pemberian makanan tambahan dan dinas kesehatan berperan sekali dalam pemberian makan tambahan tersebut dimana pemberian maknanan tambahan tersebut dinas kesehatan harus memastikan agar makanan tersebut sampai ke mulut masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibuk Filzah selaku orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal

29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui tentang sosialisasi dan edukasi yang di lakukan dinas kesehatan dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“Untuk pelaksanaan di lapangan pihak dinas kesehatan bertanggung jawab atas pemberian makanan tambahan harus sampai di mulut anak-anak kami dan dinas kesehatan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa, saya kemarin mengikuti pengajian atau pemberian edukasi dan pihak dinas kesehatan memberi tahu mengenai stunting, jadi kita semua di kasih tau bahwa pentingnya menjaga pola hidup yang sehat”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu filzah selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang bahwa Komitmen pelaksana dari dinas kesehatan cukup bagus dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada untuk penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar. Seperti pelaksanaa di lapangan berupa pemberian tambahan makanan, sosialisasi, pemberian edukasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu orang tua bayi yang penderita stunting dengan ibu Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang tentang mengetahui apakah ada sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dinas kesehatan pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di tempat, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan di lapangan pihak dinas kesehatan bertanggung jawab seperti contoh salah satu nya pemberian makanan tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan, dimana makanan tersebut harus sampai di mulut anak-anak kami, dan dinas kesehatan juga memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa dan kami senang adanya usaha dari dinas-dinas yang peduli pada kami, saya sudah pernah mengikuti sosialisasi di kampung, lewat ibu-ibu PKK yang di sampaikan langsung sama pegawainya Dinas kesehatan, disitu saya baru tau tentang ini dibilang stunting”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang pelaksanaan lapangan yang di lakukan dinas kesehatan sudah optimal dengan adanya pemberian tambahan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga dinas kesehatan melakukan sosialisasi bersama dinas-dinas lainnya ke desa-desa, dan juga dinas kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan stunting.

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.8 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtitas balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan norma l	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa pelaksanaan di lapangan dari dinas kesehatan memang cukup bagus dalam penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar, dinas kesehatan memberikan edukasi, sosialisasi bersama dinas-dinas lainnya, dan memberikan makanan tambahan kepada masyarakat yang bersangkutan, dan dinas kesehatan

berperan dalam pemberian makanan tersebut harus sampai kepada mulut anak yang bersangkutan.

d. **Pelatihan Tenaga Kerja**

Dalam menekan angka stunting, tentu dibutuhkan tenaga kerja yang profesional, untuk menjadikan tenaga kerja profesional dinas kesehatan melakukan pelatihan kepada tenaga kerja di dinas kesehatan Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui apa saja yang di perlukan untuk membuat tenaga kerja dinas kesehatan profesional, peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan ibu Afrida Yanti selaku bagian kepala bidang kesehatan masyarakat, menyampaikan:

“Dalam penanganan stunting kami (Dinas Kesehatan) melakukan kepada tenaga medis berupa pelatihan secara berkala satu kali dalam tiga bulan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Afrida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk penanganan stunting dibutuhkan tenaga kerja yang profesional, dengan adanya pelatihan tenaga kerja yang di lakukan oleh dinas kesehatan maka tenaga kerja dinas kesehatan bisa di andalkan dalam penanganan stunting.

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.9 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtitas balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa pelatihan tenaga kerja dari dinas kesehatan memang cukup bagus dalam penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar, dengan adanya pelatihan tenaga kerja makan tenga kerja lebih profesional dan dapat di andalkan untuk menekan dan menangani stunting pada balita di Kabupaten Kampar.

3. Struktural

Dengan tindakan stuktural dapat di artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat. (Soerjono Soekanto 2004:213), Dalam hal ini tentu perlu dilakukan Stuktural yang di lakukann oleh Dinas Kesehatan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kampar Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

a. SOP (*Standart Operation Procedures*)

Bagian terpenting dalam organisasi adalah adanya SOP, kegunaan SOP adalah suatu pedoman tertulis yang digunakan untuk menggerakkan pelaksana

dalam pembagian tugas agar organisasi yang di jalankan efektif sehingga agar tujuan dapat di capai Kegunaan SOP agar pelaksana menjaga konsisten dalam melaksanakan tugas, dan mengetahui dengan jelas fungsi beserta peran di setiap posisi dalam organisasi, untuk mengetahui adanya SOP Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Klabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan ibu Afrida Yanti selaku bagian kepala bidang kesehatan masyarakat, menyampaikan:

“Untuk SOP dalam penanganan stunting sudah jelas adanya, masing masing aksi ada SOP nya, kami bekerja sesuai SOP, peran dinas kesehatan ada di beberapa aksi tersebut berupa aksi satu, dua, tiga dan enam, dan semua itu kami kerjakan atau kami laksanakan sesuai SOP”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afirida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa SOP (Standart Operation Prosedur) dalam penanganan stunting sudah ada, dinas kesehatan bekerja sebaik mungkin sesuai SOP yang telah ada, dimana peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting ada di beberapa aksi yang telah di tetapkan, dan dinas kesehatan melaksanakan semua itu sesuai dengan SOP yang telah ada.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibuk Filzah selaku orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui tentang sosialisasi dan edukasi yang di lakukan

dinas kesehatan dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“Mungkin Dinas Kesehatan telah bekerja sesuai SOP yang telah ada dalam penanganan stunting di kabupaten kampar ini” penanganan stunting di Kabupaten Kampar sudah ada di buat, dan Dinas kesehatan menjalankan tugas dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar sesuai SOP yang telah ada”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Filzah di atas peneliti menyimpulkan bahwa SOP (Standart Operation Prosedur) dalam penanganan stunting sudah ada, dinas kesehatan bekerja sebaik mungkin sesuai SOP yang telah ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu orang tua bayi yang penderita stunting dengan ibu Nur kholina selaku masyarakat Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang tentang mengetahui apakah SOP yang di terapkan dan dijalankan dinas kesehatan pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di tempat, beliau mengatakan bahwa:

“Setau saya SOP untuk dinas kesehatan telah bekerja sesuai SOP yang telah ada dalam penanganan stunting di kabupaten kampar ini” penanganan stunting di Kabupaten Kampar sudah ada di buat dan pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur kholina di atas peneliti menyimpulkan bahwa SOP (Standart Operation Prosedur) dalam penanganan stunting sudah ada, dinas kesehatan bekerja sebaik mungkin sesuai SOP yang telah ada dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar.

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.10 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtitas balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa dalam penangana stunting dinas kesehatan sudah mempunyai SOP,dan dinas kesehatan sudah bekerja sesuai SOP yang telah ada untuk penanganan stunting pada balita di Kabupar Kampar.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab merupakan hal yang penting bagi pelaksana penurunan angka stunting pada anak balita di kabupaten Kampar, Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab dalam penanganan stunting di kabupaten Kampar peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Klabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan ibu Afrida Yanti selaku bagian kepala bidang kesehatan masyarakat, menyampaikan:

“Jadi kami bagian kesehatan masyarakat di bidang gizi berperan bagaimana 1000 hari pertama kehidupan di tingkat desa sampai ke masyarakat bisa kami tangani dengan baik, 1000 HPK itu di mulai sejak ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun supaya perkembangan otak itu tidak terganggu dan kami sangat bertanggung jawab atas tugas yang di berikan, misalnya pemberian makanan tambahan kami berperan agar makanan tersebut harus sampai kepada mulut anak yang bersangkutan dan kami bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai tupoksi masing masing bidang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afirida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dinas kesehatan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dalam penanganan stunting, dan dinas kesehatan yaitu bagian kesehatan masyarakat di bidang gizi berperan bagaimana 1000 hari pertama kehidupan di tingkat desa sampai ke masyarakat bisa di tangani dengan baik

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibuk Filzah selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui sikap pelaksana dari dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“Menurut saya dinas kesehatan cukup bagus dalam menjalankan tugas untuk menekan angka stunting di daerah kami, mereka juga bertanggung jawab atas tugas nya seperti mereka berperan bagaimana pemberian makanan tambaha nyang di berikan itu harus sampai kemulut anak yang bersangkutan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Filzah selaku masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dinas kesehatan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dalam penanganan stunting, dan dinas kesehatan berperan

dan bertanggung jawab atas pemberian makanan tambahan dimana makanan tersebut harus sampai ke mulut anak yang bersangkutan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu masyarakat Ibuk Nur Kholina selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai sikap pelaksana dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di Kabupaten Kampar, lalu Ibu Nur kholina mengatakan:

“Menurut saya ya dek dinas kesehatan bagus dalam menjalankan tugas dalam penanganan stunting pada anak balita di desa, mereka juga bertanggung jawab atas tugas nya seperti 1000 HPK yang seperti adek katakana, pemberian makanan berupa biscuit dan juga mereka berperan bagaimana pemberian makanan tambahan itu harus diberikan pada anak dan harus sampai sampai kemulut anak yang bersangkutan yaitu penderita stunting”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Filzah selaku masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dinas kesehatan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dalam penanganan stunting, dan dinas kesehatan berperan dan bertanggung jawab atas pemberian makanan tambahan dimana makanan tersebut harus sampai ke mulut anak yang bersangkutan.

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.11 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtitas balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa dalam penangana stunting dinas kesehatan tugas nya berperan bagaimana 1000 hari pertama kehidupan di tingkat desa sampai ke masyarakat bisa kami tangani dengan baik, 1000 HPK itu di mulai sejak ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun supaya perkembangan otak itu tidak terganggu dan kami sangat bertanggung jawab atas tugas yang di berikan, misalnya pemberian makanan tambahan kami berperan agar makanan tersebut harus sampai kepada mulut anak yang bersangkutan dan kami bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai tupoksi masing masing bidang.

c. Anggaran Pelaksana

Untuk menekan angka stunting, memang harus di barengi dengan adanya ketersediaan anggaran, karena tanpa anggran hasil dari suatu kebijakan tidak akan berjalan malsimal dan efektif. Untuk melihat anggaran dalam penanganan stunting pada balita di kabupaten kampar Kampar peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di KIabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan ibu Afrida Yanti selaku bagian kepala bidang kesehatan masyarakat, menyampaikan:

“Kalau untuk pelaksanaan anggaran contoh nya ketika saya turun ke lapangan saya di fasilitasi oleh desa untuk turun ke desa-desa dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afirida Yanti, S.st.M .kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa anggaran pelaksana seperti tenaga kerja turun ke lapangan, tenaga kerja di failitasi oleh desa untuk turun ke desa-desa dalam penanganan stunting pada anak balita di kabupaten kampar.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibuk Filzah selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui sikap pelaksana dari dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“saya kurang tau juga anggaran yang di keluarkan untuk penanganan stunting, tetapi desa memfasilitasi mereka yang melakukan pelaksanaan penanganan stunting”.

Berdasarkan hasil wawanara dengan salah satu masyarakat kecamatan tambang, Kabupaten Kampar, masyrakat tidak mengetahui anggaran pelaksana yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar.

Data penderit stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.12 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtitas balita	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggaran dalam pelaksanaan, pelaksana di fasilitasi oleh desa-desa dalam penanganan stunting dan masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran dan fasilitas yang di berikan kepada pelaksana dalam penanganan stunting.

d. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Berkaitan dengan fasilitas pendukung dalam penanganan stunting di kabupaten kampar, pada prinsipnya para pelaksana kebijakan sangat menyadari betapa pentingnya ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugas yang akan di laksanakan, peneliti menggunakan tiga indikator menurut (Soejano Soekanto 2004:213), Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar sebagaimana di utarakan oleh ibu Afrida Yanti selaku kepala bidang kesehatan masyarakat menyampaikan:

“kalau sarana kami tidak ada tapi fasilitas kita melengkapi misalnya antropometri, ini di sediakan supaya nanti pengukuran tinggi badan, berat badan anak itu pas, terkait fasilitas kesehatan itu desa yang mengadakan dan sekarang unit posyandu sudah memenuhi fasilitas yang memakai dana desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Afirida Yanti, S.st. M.kes selaku kepala bidang kesehatan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam segi fasilitas pendukung dinas kesehatan hanya melengkapi saja seperti alat ukur atau antropometri, dimana antropometri ini berguna untuk tenaga kerja dalam mengukur tinggi badan dan berat badan anak itu pas. Fasilitas kesehatan yang ada di desa seperti posyandu sudah memenuhi fasilitas yang memakai dana desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ibu Filzah selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai apakah mengetahui ketersediaan fasilitas dari dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di kabupaten Kampar, lalu Ibu Filzah mengatakan:

“dalam segi fasilitas yang di berikan, yang saya ketahui adanya alat untuk mengukur berat badan dan tinggi badan bayi supaya mengetahui tinggi dan berat badan bayi yang mengalami stunting tersebut. yang di fasilitasi oleh pihak dinas kesehatan”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa dalam segi fasilitas yang di berikan dinas kesehatan hanya memberikan alat ukur atau antropometri yang mana berguna untuk mengukur tinggi badan dan berat badan bayi itu pas.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu masyarakat Ibu Nur Kholina selaku Orang tua bayi yang menderita stunting pada

hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di kecamatan tambang, Kabupaten Kampar mengenai sikap pelaksana dinas kesehatan dalam penanganan stunting pada bayi di Kabupaten Kampar, lalu Ibu Nur kholina mengatakan:

“terkait dengan ketersediaan fasilitas pendukung baik sarana ataupun prasarana dalam penanganan stunting tentu ada dan tersedia seperti mobil dinas, alat pengukur dan lainnya sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa dalam segi fasilitas yang di berikan dinas kesehatan yang di berikan seperti alat ukur, mobil dinas dan lain sebagainya yang berguna untuk mempermudah penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar

Data penderita stunting pada bayi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat lihat sebagai berikut:

Tabel V.13 Jumlah penderita stunting pada bayi di kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Jumlah balita	Status bayi sangat pendek	Status bayi pendek	total	Persen (%)
2019	Tambang	8760	327	433	760	8.68 %
2020	Tambang	3389	169	366	535	15.79 %

Tahun	Kecamatan	Jumlah idendtitas balita yang ada eppgbm	Berat badan sangat kurang	Berat badan normal	Berat badan kurang	Resiko lebih	Jumlah	Persen (%)
2021	Tambang	8352	8	1115	72	53	1230	17.25 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Berdasar hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas kesehatan memberikan fasilitas sebagaimana umumnya saja, seperti adanya mobil dinas, alat ukur seperti antropometri dalam mempermudah penanganan stunting pada balita di Kabupaten Kampar

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah lakukan mengenai Peran Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting pada Baliya (Bayi Lima Tahun) di Kabupaten Kampar, maka dapat peneliti ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan sesuai dengan Teori Soerjono Soekanto (2004:213), maka di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar dalam indikator rule atau aturan yaitu Dinas Kesehatan tidak perlu membuat aturan atau kebijakan yang baru, dinas kesehatan hanya menjalankan dan menerapkan aturan dan kebijakan yang di buat oleh kementerian dalam penanganan stunting, dan Dinas Kesehatan sudah di katakan optimal dalam menjalankan aturan atau kebijakan yang di buat untuk menekan angka stunting pada anak balita di Kabupaten Kampar.
2. Peran Dinas kesehatan di Kabupaten Kampar dalam indikator individual sudah berperan sebagaimana mestinya dari segi pelaksanaan lapangan, pemberian edukasi, sosialasi, dan pelatihan tenaga kerja untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kampar
3. Peran Dinas kesehatan di Kabupaten Kampar dalam indikator struktural sudah dikatakan optimal, sudah adanya SOP (*standart operation procedure*) dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar, dan Dinas

kesehatan menjalankan tugas nya untuk menekan angka stunting sesuai SOP yang sudah ada, dan fasilitas berupa antropometri untuk mengetahui bayi yang terkena stunting, tidak adanya sarana dalam penanganan stunting.

Melalui penelitian ini juga diketahui hambatan-hambatan Dinas Perhubungan dalam melakukan tugasnya terhadap penanganan stunting di Kabupaten Kampar. Hambatan tersebut adalah:

1. Hambatan hambatan dalam penanganan stunting yaitu luasnya wilayah kabupaten kampar, sehingga tidak cukup untuk menekan angka stunting dalam jangka waktu pendek
2. Hambatan lainya yaitu di karenakan akses jalan menuju dese–desa di kabupaten kampar sangat susah, jadi dengan akses jalan menuju desa-desa Susah maka tenaga kerja kesulitan untuk menelusuri masyarakat yang ada di desa tersebut.

B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah Daerah meningkatkan sarana dan dana anggaran untuk Dinas Kesehatan agar dapat melaksanakan tugas nya dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar.
2. Bagi Dinas Kesehatan dan organisasi pemerintahan yang dilibatkan dalam penanganan stunting Kabupaten Kampar kiranya agar tetap konsisten dalam melaksanakan perannya dalam menekan laju penderita stunting sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan semakin gigih dalam melakukan pekerjaan agar semua tujuan yang ingin dicapai berjalan sesuai dengan keinginan.

3. Bagi masyarakat agar kiranya aktif dan berpartisipasi mengenai penekanan stunting ini dengan cara menjaga kebersihan lingkungan untuk terhindar dari berbagai penyakit agar terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri di Kabupaten Kampar.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya untuk meneliti mengenai penanganan stunting di desa-desa di kabupaten kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media Group. Jakarta
- Creswell, J. W. 2017. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- E. St Harahap, dkk. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Balai Pustaka.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. (2010). Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nazir, Mimi, Yuliani. 2020. Profil Kesehatan Provinsi Riau 2019. Pekanbaru: Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
- Moleong Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Kosda Karya. Bandung
- Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan tujuh Publishing. Pekanbaru.
- Rauf, Rahyunir. 2017. Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Wedana. Vol III.
- Rivai, Veitzal. (2004). Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sarundajang, S.H., 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. (2004). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* : Alfabeta. Bandung
- _____. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* : Alfabeta. Bandung: CV
- Syafiie, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bumi Aksara. Jakarta.

Thoha, Miftah. (2005). Kepemimpinan Dan Manajemen Pendekatan Perilaku. Bandung: Sinar Baru.

B. Jurnal

Al, A. E. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan. jurnal pustaka kesehatan, 164.

Aridiyah, F.O, & dkk. (2015). faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and urban areas). jurnal kesehatan, 166.

Mitra. (2015). permasalahan anak pendek (stunting) dan intervensi untuk mencegah terjadinya stunting (studi kepustakaan). jurnal kesehatan komunitas, 254.

Setiawan, E & dkk. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. jurnal Kesehatan andalas, 280 - 281.

Supardi. (2019, november minggu). bentuk komitmen pemkap kampar tuntaskan angka stunting. diskominfokampar/DAT.

C. Dokumentasi

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang“ pengawasan dibidang Kesehatan”

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Dinas Kesehatan

Permenkes 29 tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU no 33 Tahun 2014 Pasal 19 Tentang Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan